

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik menciptakan fenomena baru dalam inovasi dalam jasa keuangan. Salah satu inovasi teknologi jasa keuangan yaitu kegiatan transaksi pinjam meminjam uang secara online. Dalam mengajukan peminjaman uang secara online, pihak peminjam diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, kemudian akan melalui tahap verifikasi oleh pihak pemberi pinjaman. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak peminjam yaitu mencantumkan *emergency contact* yang pada prakteknya marak pihak peminjam yang mencantumkan kontak darurat secara sepihak dan tanpa persetujuan. Pencantuman kontak darurat secara sepihak menimbulkan pelanggaran penggunaan data diri pribadi dan keraguan dalam keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang secara online. Fokus pembahasan pada penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum *emergency contact* dan akibat hukum pencantuman *emergency contact* tanpa izin. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei, dengan data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yang pernah dijadikan *emergency contact* dalam praktik pinjaman uang *online*. Adapun hasil penelitian ini diperoleh bahwa bahwa perlu dilakukan beberapa penguatan regulasi terkait *emergency contact* serta peningkatan kinerja dari OJK untuk tercapainya perlindungan hukum. Penguatan regulasi terkait *emergency contact*, penguatan tersebut berupa memperjelas definisi dan peran *emergency contact*, penguatan kewajiban penyelenggara pinjaman uang *online*, batasan penggunaan informasi, dan sanksi yang tegas. Akibat hukum yang dapat timbul dari pencantuman *emergency contact* dan penggunaan data *emergency contact* dalam pinjaman online dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pemblokiran sistem kepada perusahaan pinjaman uang online, sanksi ganti kerugian kepada debitur yang mencantumkan tanpa izin atau persetujuan, dan pembatalan perjanjian.

Kata Kunci: Emergency Contact, Kontak Darurat, Pinjaman Online, Perlindungan Data Pribadi

ABSTRACT

Development of information technology and electronic transactions has created new phenomena in financial service innovations. One such innovation in financial services is online money lending transactions. In applying for an online loan, the borrower is required to meet the established requirements and then undergo a verification process by the lender. One of the requirements for the borrower is to provide an emergency contact. However, in practice, it is common for borrowers to list emergency contacts unilaterally and without consent. Listing emergency contacts without consent leads to violations of personal data usage and raises doubts about the validity of online loan agreements. This study focuses on the legal protection of emergency contacts and the legal consequences of listing emergency contacts without permission. The method used in this research is a quantitative research method with a survey approach, where data is collected through questionnaires distributed to respondents who have been listed as emergency contacts in online loan practices. The research findings indicate the need for regulatory reinforcement concerning emergency contacts and improved performance by the Financial Services Authority (OJK) to achieve legal protection. Regulatory reinforcement concerning emergency contacts includes clarifying the definition and role of emergency contacts, strengthening the obligations of online loan providers, setting limits on information usage, and imposing strict sanctions. The legal consequences of listing emergency contacts and using emergency contact data in online loans may include administrative sanctions and system blocking for online loan companies, compensation sanctions for debtors who list contacts without permission or consent, and the annulment of agreements.

Keywords: Emergency Contact, Financial Technology, Online Loan, Personal Data Act